

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki hutan yang luas. Namun, dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Tercatat kurang lebih 126,094 juta ha hutan dan kawasan hutan yang tersisa di Indonesia (BPS, 2018). Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang memiliki wilayah hutan yang cukup luas. Menurut SK.No.421/Kpts-II/1999 luas hutan di Jambi 2.179.440 ha. Di dalam kawasan hutan yang ada di Provinsi Jambi, terdapat suatu instansi pengelolaan hutan pada tingkat tapak yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Peraturan Menteri Kehutanan No.P.6/Menhut-II/2009, menjelaskan bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH meliputi KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP). Salah satu KPHP yang mengelola hutan di Provinsi Jambi yaitu KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun.

Pembentukan KPHP Limau Unit VII Hulu Kabupaten Sarolangun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.714/Menhut-II/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Wilayah KPHP Model Limau di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi seluas $\pm$ 121.102 Ha. Kondisi tutupan lahan pada wilayah KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun didominasi areal berhutan (60%) dan sisanya terdiri dari tanaman budidaya masyarakat, tanah kosong, tambang dan pemukiman. Kawasan hutan di KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun menyimpan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Potensi HHBK di KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun meliputi kepayang, madu, rotan, bambu, karet, dan lain sebagainya (RPHJP KPHP Model Unit VII Limau Hulu Kabupaten Sarolangun, 2016). Keberadaan potensi HHBK sangat penting untuk terus dikembangkan dan dimanfaatkan mengingat produktivitas kayu dari hutan alam semakin menurun (Palmolina, 2014). Nilai ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan HHBK jauh lebih besar dari kayu selain itu, tidak menyebabkan kerusakan hutan seperti hilangnya fungsi-fungsi dan nilai jasa dari hutan (Pohan *et al.*, 2014). Sehingga, HHBK dapat dijadikan sebagai suatu peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan sumber mata pencaharian sekaligus untuk mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan kayu. Karena, HHBK merupakan bagian dari ekosistem hutan yang memiliki peranan beragam untuk lingkungan dan kehidupan manusia. Sesuai dengan pernyataan Herwanti (2017), menyatakan bahwa masyarakat yang hidup di sekitar hutan mempunyai hubungan interaksi dan ketergantungan yang sangat erat dengan hutan dan HHBK serta sumber daya yang ada didalamnya.

Masyarakat di sekitar kawasan KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun sebagian besar memanfaatkan HHBK untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Umumnya masyarakat bermata pencaharian dari sektor pertanian berupa persawahan irigasi dan non irigasi, pertanian lahan kering, perkebunan khususnya kebun karet dan sebagian lagi dari penduduk bekerja dibidang perdagangan dan pegawai negeri sipil (RPHJP KPHP Model Unit VII Limau Hulu Kabupaten Sarolangun). Pada wilayah KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun masyarakat desa yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) memanfaatkan dan mengelola HHBK unggulan KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun yaitu madu dan kepayang.

Masyarakat Kecamatan Batang Asai aktif melakukan pengelolaan madu dan kepayang di Desa Raden Anom, Sungai Bemban dan Sungai Baung. Madu dan kepayang memiliki manfaat serta nilai tambah ekonomi yang tinggi. Tetapi dalam pengelolaan dan peningkatan nilai tambahnya belum optimal karena pengetahuan, teknologi dan keterampilan masyarakat setempat masih rendah. Sehingga untuk mengatasi kendala tersebut KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun bersama Kelompok Tani Hutan (KTH) menjalin kemitraan. Kelompok Tani Hutan sebagai penghasil madu dan kepayang sedangkan KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun berperan dalam melakukan pengemasan dan pemberian label serta pemasaran. Setiap kegiatan tersebut membutuhkan biaya dalam pelaksanaannya yaitu mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Oleh karena itu, perlunya pertimbangan ekonomi untuk pengambilan keputusan yang tepat berkaitan dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam pengelolaan madu dan kepayang.

Menurut Soeparmoko (2001), setiap pengusaha dalam menjalankan usahanya tentu saja mempunyai tujuan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dengan jalan memaksimumkan pendapatan, meminimumkan biaya dan memaksimumkan penjualan. Dengan berjalannya kemitraan, petani dapat meningkatkan nilai tambah dari madu dan kepayang. Maka hal ini akan mempengaruhi pendapatan petani. Karena, menurut Hafsah (2003), salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan usaha kecil serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Pendapatan Petani Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Mitra KPHP Limau Unit VII Hulu Kabupaten Sarolangun “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Berapa besar pendapatan petani madu budidaya yang bermitra dengan KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun?
2. Berapa besar pendapatan petani minyak kepayang yang bermitra dengan KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun?
3. Berapa besar kontribusi pendapatan dari HHBK Madu Budidaya dan Minyak Kepayang terhadap pendapatan total petani?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk:

1. Menganalisis pendapatan petani madu budidaya yang bermitra dengan KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun.
2. Menganalisis pendapatan petani minyak kepayang yang bermitra dengan KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun.
3. Mengetahui kontribusi pendapatan petani dari HHBK Madu Budidaya dan Minyak Kepayang terhadap pendapatan total petani.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh petani di Kecamatan Batang Asai bersama KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun agar dapat berjalan dengan baik serta memperoleh hasil yang optimal. Serta digunakan sebagai sumber referensi dan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan.